



WALIKOTA TANGERANG

PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DISAMPAIKAN PADA TANGGAL, APRIL 2017



- YTH. KETUA, WAKIL KETUA, DAN PARA ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG;
- YTH. UNSUR MUSPIDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI;
- YTH. WAKIL WALIKOTA TANGERANG;
- YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG;
- YTH. PARA PEJABAT ESSELON II DAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG;
- YTH. PARA CAMAT DAN LURAH SE-KOTA TANGERANG;
- YTH. PARA TOKOH MASYARAKAT DAN ALIM ULAMA;
- YTH. PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK;
- YTH. PARA PIMPINAN ORGANISASI PEMUDA, WANITA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN;
- YTH. PARA INSAN PERS, UNSUR MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK; SERTA
- YTH. PARA TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALÂMU'ALAIKUM WARAHMATULLÂHI WABARAKÂTUH,

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,

PERTAMA-TAMA, SEBAGAI WUJUD RASA SYUKUR, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH *SUBHAANAHU WA TA'ÂLA* - TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA, SEHINGGA KITA DAPAT BERKUMPUL DAN BERSILATURAHIM DALAM RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, DALAM RANGKA

PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016.

SHALAWAT DAN SALAM, KITA SAMPAIKAN KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W., BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA, YANG SENANTIASA MENJADI SURI TAULADAN DAN PANUTAN BAGI SEGENAP UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN INI, PERKENANKAN KAMI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2016 SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007.

PENYAMPAIAN LKPJ WALIKOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016, MENGACU PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018, SERTA BERPEDOMAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG TAHUN 2016. PENCAPAIAN KINERJA PADA LKPJ INI SUDAH MENGAKOMODIR **KEPUTUSAN DPRD KOTA TANGERANG NOMOR: 171/009–DPRD/2016 TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPJ WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2015.**

SIDANG PARIPURNA DEWAN TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN INI TAK LUPA KAMI MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG TINGGI PADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD, PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, PARA *STAKEHOLDER* PEMBANGUNAN DAERAH, SELURUH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH YANG SECARA TERUS-MENERUS BERSINERGI DAN BEKERJASAMA MENJALANKAN AGENDA-AGENDA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

MENGAWALI LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN VISI–MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM DOKUMEN RPJMD KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018. ADAPUN VISI KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018 YAITU **“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”**. PENCAPAIAN DAN PEWUJUDAN VISI KOTA TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI PELAKSANAAN **5 (LIMA) MISI** PEMBANGUNAN DAERAH DAN 47 (EMPAT PULUH TUJUH) SASARAN PEMBANGUNAN DAN 15 (LIMA BELAS) SASARAN KINERJA UTAMA.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG PADA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG DIDASARKAN PADA DOKUMEN RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- PENDAPATAN DAERAH YANG DITARGETKAN SEBESAR 3,29 TRILIUN RUPIAH DENGAN REALISASI SEBESAR 3,37 TRILIUN RUPIAH ATAU MENCAPI 102,6 PERSEN, DENGAN RINCIAN TERDIRI DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DITARGETKAN SEBESAR 1,44 TRILIUN RUPIAH TEREALISIR SEBESAR 1,59 TRILIUN RUPIAH ATAU 110,42 PERSEN, DANA PERIMBANGAN DARI TARGET SEBESAR 1,15 TRILIUN RUPIAH REALISASINYA SEBESAR 1,24 TRILIUN RUPIAH ATAU 92,74 PERSEN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH YANG DITARGETKAN SEBESAR 573 MILIAR RUPIAH REALISASINYA SEBESAR 551 MILIAR RUPIAH ATAU 96,16 PERSEN.
- BELANJA DAERAH DARI TARGET SEBESAR 4,32 TRILIUN RUPIAH DAN REALISASINYA SEBESAR 3,69 TRILIUN RUPIAH ATAU 85,49 PERSEN, TERDIRI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG DIRENCANAKAN SEBESAR 1,46 TRILIUN RUPIAH REALISASINYA SEBESAR 1,38 TRILIUN RUPIAH ATAU 94,40 PERSEN. UNTUK BELANJA LANGSUNG DARI TARGET SEBESAR 2,85 TRILIUN RUPIAH REALISASINYA SEBESAR 2,31 TRILIUN RUPIAH ATAU 80,91 PERSEN.
- PEMBIAYAAN DAERAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT ANGGARAN SEBESAR **862,96 MILIAR RUPIAH**, YANG KESEMUAANYA BERASAL DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DENGAN REALISASI SEBESAR **100 PERSEN**.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS PENCAPAIAN VISI-MISI PEMBANGUNAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2016 DAPAT DILIHAT MELALUI PENCAPAIAN 15 (LIMA BELAS) SASARAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG YAITU:

1. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR 1,58 TRILIUN RUPIAH. TINGKAT KEMANDIRIAN MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN 2015 SEBESAR 43,49 PERSEN MENJADI SEBESAR 46,90 PERSEN YANG SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 45,57 PERSEN. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TERSEBUT MELALUI OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN MENINGKATKAN

KUANTITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI, PADA TAHUN 2016 DENGAN PENCAPAIAN SECARA BERTURUT-TURUT PEMERINTAH KOTA TANGERANG UNTUK KESEMBILAN KALINYA KEMBALI MEMPEROLEH OPINI WTP DARI BPK-RI. UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN.
3. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN TELAH DIINTEGRASIKANNYA 51 APLIKASI ATAU MENCAPAI 71,00 PERSEN DIANTARANYA DASHBOARD LIVE, E-BUDGETTING, SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH (SIKDA), SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SIAP), APLIKASI SKP ONLINE, APLIKASI E-ABSENSI, APLIKASI E-OFFICE, APLIKASI LAYANAN ASPIRASI KOTAK SARAN ANDA (LAKSA), SISTEM INFORMASI PETUGAS LAPANGAN (SIGAP) BERBASIS WEB, APLIKASI WEB GIS, APLIKASI TANGERANG LIVE BERBASIS ANDROID, SERTA SISTEM INFORMASI EVALUASI DAN PELAPORAN (SIEVLAP).
4. TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI MELALUI KEMUDAHAN PERIJINAN DAN PAMERAN INDUSTRI JUMLAH PENANAMAN MODAL INVESTASI DENGAN TARGET SEBESAR 6,60 TRILIUN RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 6.86 TRILIUN RUPIAH ATAU 100,68 PERSEN DARI TARGET. JUMLAH PENANAMAN MODAL (INVESTASI) TERDIRI DARI USAHA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) SEBESAR 3,65 TRILIUN RUPIAH DAN USAHA PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SEBESAR RP. 3,21 TRILIUN RUPIAH. PELAYANAN PERIJINAN TEPAT WAKTU UNTUK 44 JENIS PERIJINAN DENGAN TOTAL 22.105 IZIN DENGAN RINCIAN 3.803 IZIN BIDANG PEMBANGUNAN SEBANYAK, 6.516 IZIN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA, SERTA 11.786 IZIN BIDANG PENANAMAN MODAL.
5. MENINGKATNYA KEPARIWISATAAN DENGAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN SEBANYAK 536.963 ORANG DENGAN RATA-RATA LAMANYA KUNJUNGAN WISATAWAN SELAMA 1,80 HARI. ADAPUN UPAYA YANG DILAKUKAN ADALAH MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PHRI DAN ASITA DALAM MERANCANG PAKET OFFERING, MEMFASILITASI PENGUSAHA HOTEL MELAKUKAN PROMOSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISMAN/ WISNUS PADA SAAT *WEEKDAYS/LOW SEASONS*, MENINGKATKAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN PIHAK HOTEL DAN TRAVEL., SERTA PEMBINAAN SECARA BERKALA MENGENAI STANDAR PELAYANAN DAN KENYAMANAN HOTEL.

6. TERWUJUDNYA INDUSTRI YANG MAJU MELALUI PENCAPAIAN NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI SEBESAR 35.638,73 MILYAR DARI TARGET SEBESAR 35.700,00 MILYAR RUPIAH ATAU 99,83 PERSEN YANG DILAKUKAN MELALUI PEMBINAAN ATAU PELATIHAN MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN MENUMBUHKAN DAN MEMBUDAYAKAN GUGUS KENDALI MUTU DI PERUSAHAAN SEHINGGA AKAN TERWUJUD MUTU KUALITAS PRODUK PERUSAHAAN YANG TINGGI DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN.
7. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DENGAN MENINGKATNYA INDEKS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG YAITU SEBESAR 0,11 POIN DARI INDEKS TAHUN 2014 SEBESAR 69,72 MENJADI 69,83 PADA TAHUN 2015. PROGRAM PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN YAITU KEGIATAN PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS SEKOLAH DASAR, BAGI 8.738 SISWA MISKIN, PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS PENDIDIKAN MENENGAH BAGI 2.221 SISWA MISKIN, BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SDN/MIN BAGI 340 SEKOLAH SD/MI NEGERI, BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SMPN/MTSN PADA 27 SEKOLAH SMP/MTS NEGERI, BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SMA/SMK PADA 15 SEKOLAH SMA NEGERI DAN 9 SMK NEGERI, SERTA PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (PAKET A, B DAN C) SEBANYAK 3.300 SISWA/WARGA BELAJAR.
8. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS KESEHATAN DENGAN CAPAIAN ANGKA INDEKS HARAPAN HIDUP MASYARAKAT SEBESAR 78,91 POINT MELALUI UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN MULAI DARI BAYI BELUM LAHIR (INTERVENSI KEPADA IBU HAMIL) SAMPAI DENGAN KELOMPOK LANJUT USIA MELIPUTI PERENCANAAN KEHAMILAN PADA PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL, POLA MAKAN DAN POLA HIDUP SEHAT BAGI SELURUH KELOMPOK USIA MELALUI PELAYANAN GIZI, PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS, SERTA PELAYANAN KESEHATAN PARA KELOMPOK USIA LANJUT DI PUSKESMAS, POSBINDU, PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP DAN PELAYANAN 24 JAM MAUPUN KEGIATAN HOMECARE, SERTA PELAYANAN GRATIS RSUD UNTUK MASYARAKAT KOTA TANGERANG.
9. TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN CAPAIAN PENURUNAN PENURUNAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) SEBESAR 3,90 PERSEN. PADA TAHUN 2015 SEBANYAK 68.577 ORANG MENJADI SEBANYAK 62.531 ORANG, SEHINGGA BERKURANG SEBANYAK 3.046 ORANG. KEGIATAN YANG DILAKUKAN YAITU PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DALAM BENTUK PEMBERIAN BAHAN POKOK YANG DIBERIKAN KEPADA 715 ORANG LANJUT USIA, PENANGANAN

MASALAH MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CACAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA BERUPA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM SEBANYAK 12.668 ORANG. DAN TERCAPAINYA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEBESAR 5,04 PERSEN ATAU SEBANYAK 80.779 ORANG DARI JUMLAH PENDUDUK SEBESAR 1.602.766 ORANG.

10. TERWUJUDNYA PENCIPTAAN DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA TERLIHAT DARI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA YANG MENURUN SEBESAR 1,01 PERSEN DARI TAHUN 2015 SEBESAR 8,01 PERSEN MENJADI 7,00 PERSEN. PADA TAHUN 2016 JUMLAH ANGKATAN KERJA SEBANYAK 1.065.744 ORANG DENGAN JUMLAH ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA SEBANYAK 991.105 ORANG DAN YANG TIDAK BEKERJA ATAU SEDANG Mencari PEKERJAAN SEBANYAK 74.639 ORANG. UPAYA YANG DILAKUKAKAN ADALAH DENGAN MEMBERIKAN LEBIH BANYAK AKSES PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN MELALUI PAMERAN KESEMPATAN KERJA (JOB FAIR) BAIK DILAKSANAKAN DI TINGKAT KOTA MAUPUN DI TINGKAT KECAMATAN SERTA MEMBERIKAN PELATIHAN PRAKTIS KEPADA PENCARI KERJA AGAR DAPAT MENINGKATKAN KETERAMPILAN UNTUK MENJADI WIRAUSAHA MAUPUN PEKERJA TERAMPIL.
11. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KESATUAN, KEBANGSAAN, KEPOLITIKAN DAN HUKUM DENGAN PERSENTASE PENYELESAIAN KONFLIK SUKU, AGAMA, RAS DAN ADAT (SARA) YANG DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN JAMBORE ORMAS YANG MELIBATKAN 16 ORMAS, PEMBAHASAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, KEGIATAN PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT, KEGIATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA, SERTA MEMPERTEMUKAN TERHADAP PIMPINAN KELOMPOK YANG MENGATASNAMAKAN SUKU TERTENTU YANG TERJADI BENTROK UNTUK DILAKSANAKAN PEMBINAAN.
12. TERWUJUDNYA PENGENDALIAN BANJIR DAN GENANGAN SELUAS 245 HA MELALUI PENGURANGAN LUASAN BANJIR DAN GENANGAN. PELAKSANAAN NORMALISASI DAN Pengerukan LUMPUR DALAM RANGKA MEMANFAATKAN SALURAN PEMBUANG DAN JARINGAN IRIGASI YANG ADA SECARA OPTIMAL, PEMBANGUNAN PUSAT – PUSAT PENGENDALIAN BANJIR MELALUI SISTEM TATA AIR MANDIRI DAN BANGUNAN TAMPUNGAN, RESAPAN AIR, SERTA PERBAIKAN MAUPUN PENINGGIAN TANGGUL YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN PERBAIKAN SISTEM DRAINASE DAN POMPANISASI TERUTAMA PADA LOKASI YANG RENDAH DAN DI TEPI SUNGAI.
13. TERWUJUDNYA PELAYANAN TANSPORTASI PERKOTAAN TERPADU MELALUI PENANGANAN SEBANYAK 89 TITIK KEMACETAN DENGAN PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS PERALATAN TRAFFIC LIGHT DAN ATCS, SERTA PENAMBAHAN PETUGAS LAPANGAN. DIOPERASIONALKANNYA ANGKUTAN MASSAL DENGAN RUTE TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – JATAKE SEPANJANG 17,5 KM.

14. TERWUJUDNYA LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DENGAN TERBANGUNNYA RUMAH LAYAK HUNI SEBANYAK 1451 RUMAH SERTA JAMBAN SEHAT BAGI 1.998 WARGA. PEMBANGUNAN SALURAN AIR SEPANJANG 128,00 METER, JALAN LINGKUNGAN SEPANJANG 318,24 M2 SERTA PEMBANGUNAN PENRANGAN JALAN UMUM LINGKUNGAN SEBANYAK 10.400 TITIK.
15. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN CAPAIAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENCAPI ANGKA 48,82 ATAU KATEGORI WASPADA. ADAPUN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN MEMBERIKAN BANTUAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN SAMPAH, ALAT BIOPORI, TEMPAT SAMPAH, TANAMAN HIAS DAN TANAMAN PRODUKTIF, KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN, PENATAAN LINGKUNGAN KAMPUNG HIJAU YANG TERSEBAR DI 13 KECAMATAN, PENINGKATAN KOORDINASI DAN KEMITRAAN ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN BEKERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG ADA DI BANTARAN KALI/SUNGAI SABI, SERTA PENANDTANGANAN KOMITMEN “GEBER KALI SABI” .

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA TAHUN ANGGARAN 2016, PEMERINTAH KOTA TANGERANG MENYELENGGARAKAN TUGAS PEMBANTUAN YANG TERDIRI DARI 1 (SATU) PROGRAM, YAITU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 1,74 MILIAR RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 1.28 MILIAR RUPIAH ATAU SEBESAR 73,36 PERSEN, YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

PIMPINAN SIDANG DAN PARA HADIRIN YANG TERHORMAT,

DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DIPERLUKAN POLA KERJASAMA KOORDINATIF ANTAR INSTANSI (SKPD), ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM WILAYAH REGIONAL, ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA, DAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT.

PADA TAHUN 2016 PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG TELAH MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH KERJASAMA SEBAGAI BERIKUT:

1. DALAM RANGKA PENINGKATAN KETERPADUAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN DI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PADA TAHUN ANGGARAN 2016 MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI PENGALOKASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN GUBERNUR BANTEN SEBESAR 21,16 MILYAR DENGAN REALISASI 10,25 MILYAR DAN BANTUAN KEUANGAN GUBERNUR DKI JAKARTA SEBESAR 108,22 MILYAR DENGAN REALISASI 27,55 MILYAR, YANG KEGIATANNYA AKAN DISELESAIKAN PADA TAHUN 2017.
2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA YANG DIJALIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PADA TAHUN ANGGARAN 2016 ANTARA LAIN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN BEBERAPA LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA TANGERANG, SEBESAR 26,26 MILYAR DENGAN REALISASI 26,23 MILYAR ATAU 99,87 PERSEN.
3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL YAITU KODIM 0506 TANGERANG, POLRES METRO TANGERANG, KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG, SERTA PENGADILAN NEGERI TANGERANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KETERPADUAN PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN, SEPERTI: KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA, PENERTIBAN BIDANG PERHUBUNGAN, PENANGANAN BENCANA, SERTA BERBAGAI KEGIATAN LAIN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
4. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERJADI DI KOTA TANGERANG SEPERTI: BENCANA BANJIR DAN KEBAKARAN, DILAKUKAN SECARA MENYELURUH DENGAN MELIBATKAN SEMUA KOMPONEN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT MELALUI PENDATAAN TITIK RAWAN BENCANA DAN LOKASI EVAKUASI; SURVEI LOKASI BENCANA; PEMANTAUAN TITIK RAWAN BANJIR, SERTA INTENSIFIKASI PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN.
5. DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PEMERINTAH KOTA TANGERANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN, YAITU: PEMBINAAN MELALUI SOSIALISASI DAN OPERASI PENERTIBAN, SERTA PEMBINAAN MELALUI PENGAWASAN, PENGAMANAN, PENATAAN POTENSI GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, YANG DALAM PELAKSANAANNYA SENANTIASA BERKOORDINASI DENGAN POLRES METRO TANGERANG, KODIM 0506 TANGERANG, KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG DAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG.
6. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BJB CABANG TANGERANG TENTANG LAYANAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DAERAH DI KOTA TANGERANG, YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 4 JANUARI 2016;

7. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA TANGERANG, YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 22 JANUARI 2016;
8. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG TANGERANG YANG DITANDATANGANI PADA TANGGAL 25 JANUARI 2015 (TINDAK LANJUT DARI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA TANGERANG, YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 22 JANUARI 2016);
9. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS GAJAH MADA TENTANG PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN UPDATING ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KOTA TANGERANG;
10. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN 28 RUMAH SAKIT TENTANG PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL DI KOTA TANGERANG;
11. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN UMUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL TANGERANG TENTANG PENGADAAN BERAS CADANGAN PANGAN, YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 25 MEI 2016;
12. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT.ANGKASA PURA II DENGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TENTANG KERJA SAMA PENYALURAN DAN PELAYANAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA, YANG TELAH DITANDATANGANI TANGGAL 13 JULI 2016;
13. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN PT.TASPEN TENTANG PELAYANAN PROAKTIF, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 8 SEPTEMBER 2016;
14. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG TANGERANG TENTANG PELAKSANAAN AJMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016;
15. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KOTA TANGERANG (APINDO) TENTANG PENEMAPATAN TENAGA KERJA TERLATIH PADA PERUSAHAAN DI KOTA TANGERANG, YANG DIATANDATANGANI PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016;
16. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN PT.GAJAH TUNGGAL, TBK TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS RUANG TERBUKA

- HIJAU TAMAN GAJAH TUNGGAL TANGERANG, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016;
17. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PT.TASPEN TENTANG PELAYANAN PROAKTIF, YANG DITANDATANGANI PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 (NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN PT.TASPEN TENTANG PELAYANAN PROAKTIF, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 8 SEPTEMBER 2016);
 18. NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN BJB CABANG TANGERANG TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANGERANG YANG AKAN MEMASUKI PENSIUN DAN MEMILIKI PINJAMAN DI BJB CABANG TANGERANG, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 19 OKTOBER 2016;
 19. MOU ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG DENGAN UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF (UNIS) TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 20 DESEMBER 2016;
 20. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN CABANG TANGERANG YANG DITANDATANGANI TANGGAL 27 DESEMBER 2016;
 21. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN 28 RUMAH SAKIT TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA TANGERANG TAHUN 2017, YANG DITANDATANGANI TANGGAL 27 DESEMBER 2016;
 22. PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PT.SULINDAFIN TENTANG PEMAGANGAN, YANG DITANDATANGANI PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2016.
 23. SELAIN KERJASAMA DI ATAS, PADA TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA TANGERANG MELAKUKAN KERJASAMA PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN VISI DAN PELAKSANAAN MISI DAERAH MELALUI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENCAPAIAN DAPAT DILIHAT MELALUI PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH ANTARA LAIN:

1. NILAI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DARI TAHUN KE TAHUN MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN PENINGKATAN YANG POSITIF. PADA TAHUN 2016 ANGKA IPM KOTA TANGERANG SEBESAR 76,55 POIN ATAU MENINGKAT SEBESAR 0,47 POIN DARI TAHUN 2015.

2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PADA TAHUN 2016 SEBESAR 5.50% PERSEN, LPE DI ATAS LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BANTEN YANG TUMBUH SEBESAR 5,26 PERSEN, SERTA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL YANG TUMBUH SEBESAR 5,02 PERSEN;
3. BESARAN INDIKATOR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2016, MENCAPI ANGKA SEBESAR 7,00 PERSEN LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2015 SEBESAR 8,01 PERSEN.
4. TINGKAT KEMISKINAN YANG MERUPAKAN SALAH SATU PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL SEBAGAI EKSES DARI PEMBANGUNAN YANG PENANGANANNYA HARUS DILAKUKAN SECARA TERPADU DAN MELIBATKAN UNSUR PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN, MAUPUN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SEKITAR WILAYAH KOTA TANGERANG. PADA TAHUN 2016 INDIKATOR TINGKAT KEMISKINAN SEBESAR 5.04 PERSEN SEDANGKAN UNTUK PROVINSI BANTEN SEBESAR 5,75 PERSEN.
5. INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM), YANG MERUPAKAN REFLEKSI DARI SIKAP PUAS ATAU TIDAK PUAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SELAMA TAHUN 2016 MASUK DALAM KATEGORI "B" (BAIK). HAL INI MENJUKKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SUDAH MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK SECARA BAIK DAN MEMUASKAN MASYARAKAT.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

ATAS RAHMAT DAN PERKENAN ALLAH S.W.T. SERTA USAHA BERSAMA YANG TAK KENAL LELAH, MAKA PADA TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG TELAH BERUPAYA MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN SEBAIK MUNGKIN. SEBAGIAN BESAR PENCAPAIANNYA BERHASIL MELAMPAUI TARGET DAN MENDAPAT APRESIASI POSITIF DARI BERBAGAI KALANGAN, TERMASUK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DAN PEMERINTAH PUSAT.

BERKAITAN DENGAN PRESTASI DAN APRESIASI, SELAMA TAHUN 2016 PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG TELAH MENDAPATKAN BERBAGAI PENGHARGAAN ANTARA LAIN:

1. PENGHARGAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) ATAS KEMANDIRIAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM MEMBERIKAN TEROBOSAN INOVATIF MENERBITKAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT);
2. PENGHARGAAN SINDO WEEKLY;

3. PENGHARGAAN INDONESIA DIGITAL ECONOMY AWARD 2016 (IDEA) DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KOTA CERDAS DI KOTA TANGERANG;
4. PENGHARGAAN OTONOMI DAERAH TERBAIK DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN;
5. PENGHARGAAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) 2016. KATEGORI IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA DAN BKD INOVATIF;
6. PENGHARGAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN);
7. PENGHARGAAN PIALA ADIPURA KIRANA DAN ADIWIYATA DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
8. PENGHARGAAN ATTRACTIVENESS AWARD 2016 DARI FRONTIER CONSULTING GROUP DAN TEMPO MEDIA GROUP SEBAGAI KOTA TERBAIK DAN KATEGORI TOP 3 INVESTASI POTENSIAL;
9. ANUGERAH JAWA PUBLIC RELATIONS (PR) INDONESIA MEDIA RELATIONS AWARDS AND SUMMIT (JAPRIMAS) 2016, UNTUK KATEGORI PEMERINTAH KOTA;
10. PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2016, KATEGORI PENERAPAN STANDAR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DARI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);
11. PENGHARGAAN LAPORAN KINERJA HUMAS DALAM ANUGERAH MEDIA HUMAS DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
12. ANUGERAH DANA RAKCA TAHUN 2016 DARI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA YANG DI BERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERKINERJA BAIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN;
13. PENGHARGAAN PERINGKAT PERTAMA BADAN PUBLIK TERBAIK DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK;
14. PENGHARGAAN PARAHITA EKA PRAYA DARI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI, DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA PERLINDUNGAN ANAK;
15. PENGHARGAAN PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2 WKSS), JUARA I TINGKAT PROVINSI BANTEN;
16. PERINGKAT KE-2 UN SMP TINGKAT PROPINSI BANTEN;
17. PERINGKAT KE-1 UN SMA TINGKAT PROVINSI BANTEN;
18. PERINGKAT KE-1 UN SMK TINGKAT PROVINSI BANTEN;
19. SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TINGKAT NASIONAL (SMAN4);
20. DUTA SANITASI TINGKAT PROVINSI BANTEN (SMPN 2);

21. JUARA I PL2SN JENJANG SD TINGKAT PROVINSI BANTEN;
22. JUARA UMUM KE-2 LKS SMK TINGKAT PROVINSI BANTEN;
23. PERINGKAT KE-2 PENGAWAS SEKOLAH SD BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI;
24. PERINGKAT KE-3 PENGAWAS DIKMEN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI;
25. JUARA OSN SMP TINGKAT PROVINSI BANTEN;
26. JUARA OSN SMA TINGKAT PROVINSI BANTEN;
27. JUARA OSN SMK TINGKAT PROVINSI BANTEN.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIANLAH URAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI ISI DARI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016.

AKHIR KATA, DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH *SUBHAANAHU WA TA'ÂLA*- TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA KIRANYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT BERKENAN MEMPELAJARI DAN MENDALAMI LEBIH LANJUT ISI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA INI DAN DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN-MASUKAN UNTUK PERBAIKAN KEDEPAN, ATAS SEGALA PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

WA BILLÂHI TAUFIQ WAL HIDÂYAH,

WASSALÂMU'ALAIKUM WARAHMATULLÂHI WABARAKÂTUH,

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH